

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Akmal Hidayat, 2018, *Hukum Badan Usaha Milik Desa*, Samudra Biru, Yogyakarta
- Ateng Syafrudin, Supin Na'a, 2010, *Republik Desa*, Alumni, Bandung.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Bambang Sanggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bintaro, 2010, *Sosiologi Pedesaan*, Cv. Andi Offset, Yogyakarta.
- Buku *Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, 2007, Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni Bandung.
- Cst. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Edi Suharto, 2007, *Kebijakan Sosial: Sebagai Kebijakan Publik*, Alfabet, Bandung.
- E.Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan keenam, PT. Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- G.H.S. Lumbang Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Habib Adjie, 2017, *Sanksi Perdata & Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Keempat, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 1945, *General Theory Of Law and State*, New York.
- HAW Widjaja, 2003, *Pemerintahan Desa/Marga*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Herlien Soerojo, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- H. M. N. Purwosujipto, 2009, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Total Media.
- Indroharto, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Isis Ikhwanasyah, dkk, 2020, *Badan usaha Milik Desa (BUMDesa): Strategi Pemberdayaan Potensi BUMDesa*, Keni Media, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan NKRI, Sinar Grafika.
- J. Purnomo, 2016, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)*, Infest, Yogyakarta.
- Kaelan, M.S, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi dan Seni)*, Paradigma, Yogyakarta.
- Maryunani, 2007, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- M.J Kasiyanto, 1994, *Masalah dan Strategi Pembangunan Indonesia*, Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara, Jakarta.

- Moch. Solekhan, 2014, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Setara Press, Jakarta.
- Nurcholis Hanif, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pieter Latumenten, 2011, *Cacat Yuridis Akta Notaris Dalam Peristiwa Konkrit Dan Implikasi Hukumnya*, TUMA Press, Jakarta.
- Philipus, M. Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam *Yuridika*, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember.
- Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya.
- P. N. H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 1992, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1995, *Hak Ingkar Dari Notaris dan Hubungan dengan KUHP (Suatu Kajian Uraian yang Disajikan dalam Kongres INI Jakarta)*.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soetjipto, HM. Noer, 2015, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur: Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, K-Media, Bantul.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penenlitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Suharsono, 2010, *Kamus Besar Hukum*, Vandetta Publishing, Fienso.

Sutoro Eko, 2005, *Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Otonomi Desa, dalam Soetandyo Wignosubroto dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah, Sketsa Perjalanan 100 tahun*, Institute For Local Development dan Yayasan Tifa, Jakarta.

Sutoro Eko, 2015, *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, Semangat UU Desa)*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1989, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Suparji, 2019, *Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*, UAI Press, Jakarta.

Sri Soedewi Masjchoen, *Badan Hukum pribadi*, Gadjah Mada, Yogyakarta.

Stout HD, 2004, *de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung.

Yayat Rukayat, 2021, *Manajmen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta, Bee Media Pustaka.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Erlangga, Jakarta.

Zul Fadli, 2020, *Hukum Akta Notaris*, Cetakan Kedua, Lingkar Kenotariatan, Jambi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

C. Tesis dan Jurnal Ilmiah Hukum

Ageng Triganda Sayuti, Peran Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa, *Recital Review*, Volume 1, Nomor 1, 2019, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Alfiansyah, Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas DiUndangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Volume 5, Nomor 1, 2021.

Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, 2000, Universitas Parahyangan, Bandung.

Didi Syaputra, 2022, Implikasi Hukum Badan Usaha Milik Desa Berbadan Hukum Perkumpulan Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendiannya, Tesis, Universitas Jambi.

Dita Dwi Mulyanti, Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Serang Dan Desa Wisata Panusupan), *Jurnal Hukum Diponegoro Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2017.

Hayyuna R, Ptariwi RN, Mindarti LI, Strategi Manajemen Aset BUMDesa dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa (Studi pada BUMDesa di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik), *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 2, Nomor 1, 2014.

Muhammad Khalid Hamka, 2017, Tinjauan Hukum Bentuk Badan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Muhammad Rifki Armi, 2018, Fungsi Akta Notaris Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Suatu Badan Hukum, Tesis, Universitas Jambi.

Pahlefi, Evalina. Perlindungan Dan Penghormatan Hak-Hak Masyarakat Adat Talang Mamak Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kabupaten Tebo, *Recital Review*, Volume 5, Nomor 1, 2023, Fakultas Hukum, Universitas Jambi.

Rifa'I, dkk, Studi Kelayakan Pendirian Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, *Jurnal Siasat*, 2006, Fisipol-Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Rosita Adiani, Penguatan Bumdes Dengan Status Badan Hukum, *Artikel*, 2019, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

Tarsisius Muewadji, Deden Suryo, dkk, BUMDesa Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia, *Acta Diurnal*, Volume 1, Nomor 1, 2017.

Zulkarnain Ridlwan, Urgensi Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan Perekonomian Desa, *Jurnal Fiat Justisia*, Vol. 8, Nomor 3, 2018.

Zulman Barniat, Otonomi Desa: Konsep Teoritis dan Legal, *Jurnal Analisis Sosial Politik*, Volume 5, No. 1, 2019.

D. Internet

Erni Herawati, 2016, *Badan Usaha Milik Desa, Status dan Pembentukannya*, Bina Nusantara (online) <https://businesslaw.binus.ac.id/2016/10/16/badan-usaha-milikdesa-status-dan-pembentukannya/#>, (25 Pebruari 20223, jam 22:00).